

Menggali (Memetik) Pancasila Kembali¹

Goenawan Mohamad

I

Hari-hari ini Pancasila dipetik kembali dari masa silam. Sebuah lagu baru bahkan diciptakan oleh Franky Sahilatua, *Pancasila Rumah Kita*, tanpa dipesan siapapun. Saya saksikan lagu itu dinyanyikan dengan bersungguh-sungguh oleh sebuah generasi yang kemarin ingin melupakan apa yang pernah dijejalkan kepada mereka -- dijejalkan oleh 'Orde .Baru': bukan saja *Garuda Pancasila* yang tak henti-hentinya diperdengarkan, disertai pelajaran PMP di sekolah dan penataran P-4 di kantor-kantor, tapi juga rasa takut dituduh 'tak-Pancasilais' yang disebar di seluruh penjuru.

Di saat seperti itu, Pancasila jadi titik simpul identifikasi diri yang antagonis. Kita tahu 'Orde Baru' lahir dari krisis (yang diterjemahkan sebagai 'ancaman'), dan 'Orde Baru' menampilkan diri sebagai sistem yang diperlukan untuk mengatasi krisis atau ancaman itu. Dalam posisi antagonis seperti itu, identifikasi diri selalu muncul seakan-akan sebuah representasi utuh dan total dari 'kami' dalam menghadapi 'kalian', dari 'kita' dalam menghadapi 'mereka'. Identitas mengeras, ketika ia jadi bagian dari kekerasan.

Di situlah Pancasila bukan lagi sebuah acuan, tapi sebuah perumusan (jati) diri. Sebuah acuan tak bersifat tertutup, pasti, dan final. Dalam sebuah acuan selamanya ada sesuatu yang belum tercakup, dan sebab itu sebuah acuan cenderung terbuka. Sebaliknya sebuah perumusan (jati) diri. Seperti tampak dari akar katanya, 'rumus', perumusan diri mengklaim kepastian. Sebuah perumusan diri mengklaim bahwa rumus itu mencakup hidup kita secara total, dan bahwa rumus itu mendahului tiap pengalaman, mendahului sejarah.

¹ Naskah ini hanya untuk kepentingan "Seminar Membaca GM 2021". Naskah belum diedit untuk kepentingan publikasi.

Tentu saja klaim itu hanya hasil sebuah ilusi. Tak ada perumusan diri sebuah sistem – entah itu ‘sosialisme’ atau ‘kapitalisme’ atau ‘Pancasila’ -- yang dapat mencakup secara total dan tertutup hal ihwal yang hidup dalam sistem itu. Maka tiap perumusan diri tak pernah kekal dan stabil, tiap perumusan diri mengandung ketegangan dan rasa cemas. Itu sebabnya ‘Orde Baru’ menyelenggarakan Penataran P-4 secara luas dan terus menerus – dan pada saat yang sama, beribu-ribu orang dikategorikan ‘anti-Pancasila’ dan dipenjarakan.

Jika ada yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari masa itu ialah bagaimana rezim itu tampak terbelah, justru dalam usahanya untuk membuat Pancasila sebagai titik pusat identifikasi diri.

Di satu pihak, ‘Orde Baru’ bertumpu pada krisis dan ancaman, dan dengan demikian bersifat darurat. Tapi pada saat yang sama, rezim itu mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu yang dianggap berada di atas sejarah, tak tersentuh ruang dan waktu. Di satu pihak, ‘Orde Baru’ mengukuhkan diri dengan menyingkirkan ‘yang-lain’, yang-beda, ke luar, tapi sebagaimana tiap antagonisme, yang terjadi bukanlah penyingkiran secara radikal; yang terjadi adalah sebuah dikhotomi antara pihak ‘sini’ dan pihak ‘sana’ – dengan kata lain, kedua pihak justru sama-sama perlu ada.

‘Orde Baru’ tak mengakui keadaan dirinya yang terbelah itu; ia mencoba menutupinya dengan tangan besi. Tapi justru semakin jelas, bahwa identitas yang dipilihnya, diambil-alihnya, dan disusunnya sebenarnya tak kodrati, melainkan sesuatu yang dibentuk, bahkan dibentuk dalam kekerasan, juga dalam keadaan cemas dan tegang. .

Maka jika kini Pancasila dipetik kembali, ada tiga persoalan yang perlu diulas.

Pertama, dapatkah Pancasila di awal abad ke-21 ini jadi titik simpul identifikasi diri yang tidak antagonis? Kedua, sehubungan dengan itu, dapatkah kita menerima Pancasila bukan sebagai sebuah perumusan diri, melainkan sebagai acuan? Bukan sebagai dasar atau fondasi, melainkan sebagai cakrawala? Ketiga, pelembaan

politik yang bagaimana yang memungkinkan itu dan yang bagaimana pula yang tidak memungkinkannya?

Makalah ini – dengan pendekatan yang miring ke pemikiran politik -- akan mencoba menjawab persoalan-persoalan di atas, tapi sebelum mengulas lebih lanjut ketiganya, baiklah kita lihat lebih dulu kenapa justru itulah yang jadi persoalannya.

II

Tiap peristiwa sejarah dimulai dengan gendang dan berakhir dengan suara rebab. Tiap peristiwa sejarah, artinya tiap gerak pembebasan manusia, dimulai dengan gemuruh kerja yang utuh, padu, dan bersemangat, namun kemudian berkembang sesuatu yang tak pasti, seperti gemetar, terkadang sumbang.

Yang terakhir itulah yang terjadi di tahun 1950-an di Indonesia se usai perang kemerdekaan – sebuah suasana yang digambarkan dengan subtil dalam film *Lewat Jam Malam* yang diproduksi Perfini di tahun-tahun itu: seorang bekas gerilyawan merasakan alienasi ketika ia harus hidup dalam keteraturan kantor dan kehidupan sosial. Dalam idiom yang lain Novelis Ramadhan K.H. menyebut suasana itu sebagai ‘royan revolusi’; ‘royan’ adalah perasaan tak nyaman, pegal, lelah dan linu setelah seorang perempuan melahirkan. Itulah yang terasa dulu, setelah Revolusi, dan agaknya itu pula yang terasa kini, setelah ‘Reformasi’.

Dari pengalaman itu – sebetulnya pengalaman abad ke-20 yang penuh luka itu – ada satu tema besar yang bisa dicatat: kemerdekaan ternyata bukanlah ‘jembatan emas’ seperti dibayangkan Bung Karno di masa penjajahan Belanda. Kemerdekaan ternyata jembatan yang penuh lobang dan hambatan, onak dan duri, rumit dan rentan, tanpa rambu-rambu yang jelas, meskipun kita berjalan terus di sana, bangun kembali tiap kali kita jatuh.

Di perjalanan yang susah-payah itu, ada beberapa problem yang dulu tak terbayangkan, tapi jadi gamblang di awal abad ke-21 ini:

1 – kontradiksi yang tak juga terselesaikan antara pertumbuhan dan pemerataan -- sejajar dengan kontradiksi antara kebebasan dan keadilan (satu hal yang tak hanya tampak di Indonesia, tapi juga di Uni Soviet di bawah sosialisme, di Eropa Barat di bawah ide ‘welfare state’, datangnya perekonomian ala Thatcher dan ‘supply side’ di bawah Reagan, yang semangatnya berlanjut dengan sedikit variasi di negeri-negeri kapitalis lama)

2 – ketegangan yang terus menerus antara persatuan dan kebhinekaan: ini tak hanya tercermin pada kesulitan-kesulitan sentralisasi dan desentralisasi, tapi juga dalam politik multikulturalisme atau kebijakan pluralisme.

3 – ketegangan antara yang global dan yang nasional: di satu sisi makin tampak bahwa sebenarnya perbatasan adalah sesuatu yang tak mutlak dan tak niscaya, dan di lain pihak makin ada kebutuhan untuk punya perbatasan yang meyakinkan.

Langsung atau tak langsung berkaitan dengan itu, di bidang pemikiran politik beberapa persoalan timbul mencari jawab.

I -- Tampaknya jelas, kita tak bisa lagi berpegang pada pada proyek pembebasan yang dirumuskan dalam bentuk desain yang menyeluruh, terutama setelah runtuhnya eksperimen Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dan RRC. Bahkan jauh sebelum Tembok Berlin dirubuhkan, telah terkenal ucapan bahwa zaman ini adalah zaman ‘ketidakpercayaan kepada narasi besar’, yang disebut sebagai keadaan pasca-modern.

Tanpa desain yang menyeluruh, tanpa metafisika dan ‘narasi besar’, pragmatisme nampaknya mendapatkan apresiasi kembali dan dikembangkan lebih lanjut. Persoalan yang kemudian timbul adalah bagaimana pragmatisme ini akan berurusan dengan nilai-nilai – tentang yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang keji -- yang umumnya dikaitkan dengan sebuah fondasi yang tunggal.

II – Persoalan modernitas. Modernitas dianggap telah memproyeksikan manusia sebagai pelaku sejarah yang mampu mencapai tatanan masyarakat yang sempurna – tapi ternyata masyarakat yang sempurna itulah yang tak kunjung terjadi. ..

Bisakah kita menganggap, seperti gagasan Penxerahan Eropa, manusia sebagai Subyek (dengan ‘S’ kapital) yang universal, utuh, dengan identitas yang jelas? Kritik terhadap pandangan ini sudah lama terdengar, terutama sejak pemikiran Nietzsche dan kemudian Heidegger, tapi semakin ramai dengan dikumandangkannya pemikiran Freud yang dipertajam oleh psikoanalisis Lacan yang termashur dengan pengertiannya tentang ‘subyek yang terbelah’, terjemahan bebas atas *le sujet barré*.

III - Persoalan universalitas. Adakah suatu sifat dalam manusia dan konsep tentang hal ihwal yang universal, yang berlaku di mana saja, kapan saja? Kritik kepada modernitas, kegagalan narasi besar, pada gilirannya membawa kita kepada keraguan: jangan-jangan manusia dan kehidupannya tak punya sifat universal, melainkan sepenuhnya partikular. Tapi bisakah kita – untuk memakai kata-kata Marx – tak hanya menafsirkan dunia, namun juga mengubah dunia, seandainya tak ada subyek yang utuh dan kukuh, dan seandainya tak ada unsur yang universal dalam ketidak-puasan kita, protes kita, cita-cita kita, dan gagasan kita?

IV – Bagaimana kita menghadapi perbedaan? Ketika universalitas ditolak – sebab dianggap semacam Coca Cola, produk Barat yang dipaksakan untuk diterima di mana saja, kapan saja -- bisakah kita hidup yang bersendi pada asas perbedaan sepenuh-penuhnya? Ketegangan antara perbedaan dan kesetaraan (yang oleh Laclau disebut sebagai *the logic of difference* dan *the logic of equivalence*) akan selalu merundung kehidupan politik.

V –

III

Singkat kata, kita hidup dalam sebuah zaman yang makin menyadari ketidak-sempurnaan nasib. Memang, kedengarannya ada suara optimistis ketika di tahun 1992 Francis Fukuyama mengatakan bahwa kita berada di ‘akhir sejarah’. Tapi ia tak mengatakan bahwa hidup tak akan lagi dirundung cela. Memang ia merayakan kemenangan ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal yang kini tampak di banyak sudut. Ia ingin menunjukkan bahwa pandangan alternatif yang yakin untuk menggantikan kapitalisme dan demokrasi liberal telah kehilangan daya pikat; ideologi telah berakhir, seperti telah dikatakan Raymond Aron di tahun 1955 dan Daniel Bell di tahun 1960. Orang terdorong untuk jadi pragmatis. Tapi ada yang harus dibayar.

‘Akhir sejarah akan merupakan sebuah peristiwa yang amat sedih’, tulis Fukuyama. ‘Perjuangan untuk diakui, kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita yang sepenuhnya abstrak, pergulatan ideologis sedunia yang menggugah tualang, keberanian, imajinasi, dan idealisme, akan digantikan oleh perhitungan ekonomis, keprihatinan soal lingkungan dan pemuasan permintaan konsumen yang kian canggih’.

Fukuyama tak sepenuhnya betul. Kini masih ada orang-orang yang terbakar oleh ‘kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita’; kita mengetahuinya tiap kali ada seseorang yang meledakkan tubuhnya sebagai alat pembunuh musuh.

Bahkan dalam sebuah proses politik yang ‘normal’, tak semua hal digantikan oleh ‘perhitungan ekonomis’ dan ‘pemuasan permintaan konsumen’. Tapi apa yang betul dan tak betul dalam kesimpulan Fukuyama tetap menunjukkan kesadaran zaman ini: nasib manusia adalah ketidak-sempurnaan.

Pancasila. Ketika Bung Karno menjelaskan, seraya membujuk, perlunya Indonesia mempunyai sebuah *Weltanschauung*, sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan, ia sebenarnya sedang meniti buih untuk selamat sampai ke seberang.

Sebab itu, jika ditelaah benar, pidato *Lahirnya Pancasila* yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 itu mengandung beberapa kontradiksi -- yang bagi saya menunjukkan

bahwa Bung Karno sedang mencoba mengatasi pelbagai hal yang saling bertentangan yang dihadapi Indonesia.

Kontradiksi yang paling menonjol justru pada masalah *Weltanschauung* itu. Sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan, atau sebuah ‘dasar filsafat’ (Bung Karno menyebutnya *philosophische grondslag*) yang melandasi persatuan bangsa adalah sebuah fondasi, perekat dan sekaligus payung. Di sini tersirat kecenderungan untuk memandangnya sebagai sesuatu yang harus kukuh dan sempurna – sebuah kecenderungan yang makin mengeras di masa ‘Orde Baru’, yang menganggap Pancasila itu ‘sakti’.

Jika demikian halnya, ia tak bisa diubah. Tapi timbul persoalan: bagaimana pandangan ini memungkinkan sebuah kehidupan politik yang, seperti dikatakan Bung Karno sendiri, niscaya mengandung ‘perjuangan faham’? Kata Bung Karno, tak ada sebuah negara yang hidup yang tak mengandung ‘kawah Candradimuka’ yang ‘mendidih’ di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’.

Ketika Bung Karno menyebut kalimat ini, ketika ia mengakui bahwa sebuah negara mau tak mau mengandung ‘perjuangan sehebat-hebatnya’ di dalam persoalan ‘faham’, ia menatap ke sebuah arah: ia ingin membuat tenteram kalangan politik Islam. Ia menganjurkan agar ‘pihak Islam’ menerima berdirinya sebuah negara yang ‘satu buat semua, semua buat satu’. Ia menolak ‘egoisme-agama’.

Tapi ia juga membuka diri kepada kemungkinan ini: bisa saja suatu saat nanti hukum yang ditegakkan di Indonesia adalah hukum Islam – jika ‘utusan-utusan Islam’ menduduki ‘sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat’.

Di sini tampak, perjuangan ke arah hegemoni diakui sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Tapi dengan demikian, *Weltanschauung* yang dirumuskan sebenarnya bukan fondasi yang kedap, pejal, sudah final dan kekal, hingga meniadakan kemungkinan satu ‘faham’ menerobosnya dan mengambil-alih posisi ‘filsafat dasar’ itu. Dengan kata lain, Pancasila bukan sesuatu yang ‘sakti’.

